

MERAYAKAN KUASA AGAMA: ETNOGRAFI RAZIA PENEGAKAN SYARIAT ISLAM DI LANGSA, ACEH

Muhammad Ansor

*Institut Agama Islam Negeri Langsa
Jalan Meurandeh, Kota Langsa, Aceh, 24354, Indonesia
E-mail: ansor_riau@yahoo.co.id*

Received: 14/03/2017	Revised: 22/06/2017	Approved: 22/06/2017
--------------------------------	-------------------------------	--------------------------------

Abstrak

Tulisan ini mempresentasikan etnografi razia penegakan syariat Islam di Langsa, Aceh. Studi berargumen bahwa razia syariat Islam merupakan salah satu bentuk perayaan kuasa agama oleh negara yang berkontribusi terhadap reproduksi intoleransi dan kekerasan dalam beragama. Data yang digunakan bersumber dari studi etnografis di Langsa pada semester kedua tahun 2012. Pertama-tama saya akan menyajikan tinjauan umum tentang Dinas Syariat Islam (DSI) dan Wilayatul Hisbah (WH) serta posisinya sebagai institusi yang memiliki otoritas tidak hanya untuk mendefinisikan moralitas publik, tetapi terkadang juga bertindak represif melalui razia syariat Islam di Aceh. Pemaparan menunjukkan represi tersebut melalui catatan etnografis tentang razia khalwat dan pakaian ketat di Langsa. Tulisan pada akhirnya memperlihatkan gosip sebagai salah satu bentuk resistensi kreatif terhadap represi yang dilakukan negara dan elite agama di Langsa dengan mengatas-namakan penegakan syariat Islam.

Kata kunci : Razia Syariat Islam, Kuasa Agama, dan Aceh

Abstract:

This paper presents the ethnography of Sharia' enforcement raids in Langsa, Aceh. It presents the argument that Sharia' enforcement raids is one of religious power celebrations by the state that contribute towards intolerance reproduction and violence in religion. Ethnographic data were obtained from field reseach in Langsa in the second half of 2012. First of all, I presented an overview on the State Shari'a Agency (Dinas Syariat Islam) and the "Shari'a Police" (Wilayatul Hisbah) as well as their positions as institutions which had not only the authority in defining public morality, but also repressing Sharia' enforcement raids in Aceh. Exposure of this study showed there was repression through ethnographic records about the roadside WH inspection on khalwat and dress code as the enforcement of Shari'a norms of public morality in Langsa. Finally, this paper highlighted that gossip was a form of creative resistance against repression by the State and the religious elites concerning Sharia' enforcement in Langsa.

Keywords: *Sharia' Enforcement Raids, power of Religion, and Aceh*

A. Pendahuluan

"Ayah..., maafin Putri ya yah, Putri udah malu-maluin ayah sama semua orang. Tapi Putri berani sumpah kalau Putri gak pernah jual diri sama orang. Malam itu Putri cuma mau nonton kibot (keyboard-red) di Langsa, terus Putri duduk di lapangan begadang sama kawan-kawan Putri. Sekarang Putri gak tau harus gimana lagi, biarlah

Putri pigi cari hidup sendiri, Putri gak da gunanya lagi sekarang. [...].¹

Kalimat di atas ditulis oleh Putri Erlina, seorang gadis berumur 17 tahun, beberapa saat sebelum gantung diri di kamarnya pada 6 September 2012. Dua hari sebelumnya (4 September 2012), *headline* Koran *Pro Haba*, salah satu media cetak setempat, memberitakan Putri sebagai pelacur remaja yang terjaring razia syariat yang dilakukan Dinas Syariat Islam (DSI) dan Wilayatul Hisbah (WH) Langsa.² Pada dinihari 3 September 2012 Putri bersama tiga orang temannya terjaring razia polisi syariat di Lapangan Merdeka Langsa. Putri dianggap sebagai bukan perempuan baik-baik. Dalam sesi interogasi yang dilakukan DSI dan WH, putri menolak dituding sebagai perempuan pelacur. Tapi tidak ada yang mendengarkan bantahan Putri.

¹ Petikan surat di atas berasal dari tulisan tangan yang ditemukan di kamar dimana Putri Erlina bunuh diri dua hari setelah terjaring razia syariat Islam di Langsa. Teks dan foto surat tersebut beredar luas di media. Saya mengutip surat Putri Erlina dari Majalah Tempo. Jajang Jamaluddin dan Imran, "Surat Terakhir Putri," *Majalah Tempo*, 23 September 2012, 76–78.

² "Dua Pelacur ABG Dibeureukah WH," Koran *Pro Haba*, 4 September 2012. Dalam Bahasa Aceh, kata *beureukah* berarti memberkas. Kata ini biasa diartikan sebagai 'meringkus'. Koran *Waspada* menulis berita berjudul 'WH Amankan Dua Remaja Puteri' dengan menyebutkan dua remaja yang dimaksud dirazia karena melakukan mesum. Koran *Waspada*, 4 September 2012. Berdasarkan investigasi AJI Banda Aceh, kedua koran tidak melakukan check and balance terkait pemberitaan mereka. Karenanya, AJI Banda Aceh mendesak agar kedua koran meminta maaf pada pihak keluarga Putri Erlina. Taufik Al Mubarak, 'Sikap AJI Banda Aceh terhadap Kasus Pemberitaan Bunuh Diri Remaja di Langsa,' Diakses tanggal 23 Januari 2017. http://ajibanda.org/2012/09/sikap-aji-banda-aceh-terhadap-kasus-pemberitaan-bunuh-diri-remaja-di-langsa/#_ftn2," n.d.

Saya tidak melihat razia dan interogasi terhadap Putri dan kawan-kawannya. Saya hanya mendapatkan informasi dari sumber sekunder.³ Tetapi pengamatan saya saat razia syariat Islam yang dilakukan DSI dan WH Langsa tiga hari sebelumnya kiranya membantu memahami prosesi razia dan pengadilan terhadap warga yang terjaring razia syariat. Tiga hari sebelumnya, saya mengobservasi razia di Jalan Lingkar PTPN 1: suatu lokasi oleh remaja setempat dikenal sebagai “Jalan Cinta”. Saya mengikuti proses razia dan interogasi terhadap remaja yang terjaring razia. Sebagaimana R. Michael Feener, razia memperlihatkan dominasi aparatus syariat Islam dalam sistem syariat Islam Aceh.⁴

Tulisan berikut merupakan catatan etnografis tentang razia syariat Islam dengan studi kasus di Langsa, Aceh. Tulisan ini bertujuan menunjukkan bahwa razia syariat Islam merupakan salah satu bentuk perayaan kuasa agama oleh negara yang berkontribusi terhadap reproduksi intoleransi dan kekerasan dalam beragama. Setelah memaparkan protokol penelitian yang digunakan, saya menyajikan tinjauan umum tentang Dinas Syariat Islam (DSI) dan Wilayatul Hisbah (WH). Pada sesi ini saya juga memaparkan posisi keduanya sebagai institusi yang mendapatkan mandat tidak hanya untuk mendefinisikan moralitas publik, tetapi terkadang juga bertindak represif terhadap warganya. Saya menunjukkan represi tersebut melalui catatan etnografis tentang razia khalwat dan pakaian ketat di Langsa. Selanjutnya saya menganalisa

³ Jajang Jamaluddin dan Imran, *Surat Terakhir Putri*, 2012, 76–78.

⁴ R. Michael Feener, *Shari’a and Social Engineering: The Implementation of Islamic Law in Contemporary Aceh, Indonesia* (Oxford: Oxford University Press, 2013), 228–33.

gosip sebagai ungkapan resistensi terhadap represi melalui razia syariat Islam.

Diskursus tentang razia syariat sudah banyak mendapat perhatian peneliti. Sebut saja misalnya penelitian Davis Kloos, R. Michael Feener, Benjamin Otto dan Jan Michiel Otto, serta Mahdi Syihab. David Kloss membahas aksi vigilantisme dalam penegakan syariat Islam yang seringkali dilakukan dengan kekerasan dengan studi kasus di Banda Aceh. Beberapa aktivis lokal dan kelompok semi-militer yang melakukan razia, aksi kekerasan dan penghukuman tersebut pada dasarnya bertujuan untuk membantu pemerintah Aceh menegakkan syariat Islam. Karenanya, sebagaimana ditunjukkan David Kloos, tidak jarang elite agama dan pemimpin politik mendukung aksi kekerasan tersebut, sebagai salah satu cara untuk mengatasi kemerosotan moral dan melemahnya otoritas ulama dalam penegakan syariat Islam di Aceh.⁵

Tulisan Benjamin Otto dan Jan Michiel Otto membahas peranan WH di Banda Aceh dalam menegakkan syariat Islam melalui razia khalwat dan busana Islami. Otto dan Otto memperlihatkan bahwa razia khalwat merupakan salah satu keunikan sistem syariat Islam Aceh.⁶ Hal senada juga ditunjukkan R. Michael Feener bahwa implementasi syariat Islam sebagai sebuah rekayasa sosial untuk mewujudkan Aceh yang lebih baik pasca konflik dan

⁵ David Kloos, "In the Name of Syariah? Vigilante Violence, Territoriality, and Moral Authority in Aceh, Indonesia," *Indonesia* 98 (Oktober 2014): 88–89.

⁶ Benjamin Otto et al., "Shari'a Police in Banda Aceh: Enforcement of Islam-based Regulations and People's Perceptions," in *Islam and the Limits of the State: Reconfigurations of Practice, Community and Authority in Contemporary Aceh* (Leiden: Brill, 2016), 208–12.

bencana tsunami.⁷ Meski razia syariat bukan fokus penelitiannya, Feener memberi perhatian yang rinci terhadap razia sebagai elemen penting implementasi syariat Islam Aceh.⁸ Senada dengan Kloos, Feener berpandangan razia syariat Islam merupakan aksi vigilantisme yang mengatas-namakan syariat Islam.⁹ Demikian pula Mahdi Syihab melalui studinya tentang aksi razia para santri Dayah di Aceh Utara menunjukkan aksi vigilantisme pada dasarnya merupakan reaksi atas ketidakpuasan mereka terhadap kinerja DSI dan WH dalam menangani pelanggaran syariat Islam.¹⁰

Perlu digaris-bawahi bahwa area studi penelitian di atas Banda Aceh dan Aceh Utara. Lain kata, keempat studi di atas membahas dinamika razia syariat Islam dari “titik episentrum syariat Islam”. Sejauh yang berhasil diidentifikasi, studi tentang razia syariat Islam di daerah perbatasan Aceh masih relatif sedikit. Salah satunya penelitian Yogi Febriandi yang berfokus pada persepsi remaja di Langsa terhadap razia busana Islami.¹¹ Tulisan saya akan mengisi kekosongan ruang diskursus akademik tersebut. Namun, berbeda dengan tulisan sebelumnya,

⁷ R. Michael Feener, “Social Engineering through Shari’a: Islamic Law and State-Directed Da’wa in Contemporary Aceh,” *Islamic Law and Society* 19, no. 3 (2012): 275–311.

⁸ R. Michael Feener, *Shari’a and Social Engineering*, n.d., 228–33.

⁹ Ibid., 235–49.

¹⁰ Mahdi Syihab, Arskal Salim, dan Adlin Sila, “Menegakkan Syariat Islam: Etnografi Aksi Razia Santri Dayah di Aceh Utara,” in *Serambi Aceh yang Berubah: Views from Within* (Jakarta: Alvabet, 2010), 57–92.

¹¹ Yogi Febriandi, Muhammad Ansor, dan Syamsul Rizal, “Razia Busana Muslim, Syariat Panopticon, dan Remaja Perempuan Langsa, Aceh,” in *Islam dan Negosiasi Relasi Gender* (Langsa: Zawiyah, 2015), 71–94.

penelitian saya selain berfokus pada prosesi razia, juga memperlihatkan resistensi simbolik masyarakat terhadap monopoli tafsir agama melalui razia syariat Islam.

B. Protokol Kerja Lapangan

Data etnografis dikumpulkan di Langsa pada semester kedua 2012. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi non-partisipatoris, wawancara semi terstruktur maupun pembicaraan yang tidak terstruktur.¹² Saya sedikitnya lima kali mengobservasi razia Syariat Islam di Langsa selama periode penelitian, terutama razia khalwat dan busana Muslim. Tetapi, narasi utama tulisan ini direkonstruksi berdasarkan razia khalwat dan pakaian ketat pada 1-2 September 2012 di Jalan Lingkar PTPN I Langsa. Saya mendokumentasikan peristiwa baik dengan *audio recording* maupun gambar.¹³ Saya mengikuti prosesi interogasi warga yang terjaring razia. Saya membuat catatan lapangan dan selanjutnya menyusun detail narasi mulai satu hari setelah peristiwa tersebut. Sebagai mana anjuran para ahli agar riset etnografi mengutamakan self-refleksi(*self-reflexivity*),¹⁴ proses koleksi data dilakukan sendiri tanpa pendampingan asisten penelitian.

Saya melakukan wawancara baik semi terstruktur dan tidak terstruktur terhadap Kepala DSI Langsa, empat staff WH Langsa, dan empat orang perempuan yang memiliki pengalaman dirazia syariat Islam. Durasi wawancara semi terstruktur sekitar 30 s/d 90 menit. Saya juga berbicara

¹² Mengenai teknik wawancara dalam penelitian etnografis ini saya mengacu pada James P. Spradley, *The Ethnographic Interview* (New York: Holt, Rinehart and Winston, 1979).

¹³ H. Russell Bernard, *Research Methods in Anthropology: Qualitatif and Quantitative Approaches* (New York: Altamira Press, 2006), 228-30.

¹⁴ Akhil Gupta, "Authorship, Research Assistants and the Ethnographic Field," *Ethnography* 15, no. 2 (2014): 394-400.

secara acak dengan informan yang relevan atau orang yang secara kebetulan berada di lokasi razia, baik dalam kapasitas mereka sebagai aparat yang melakukan razia atau yang terjaring razia. Selain itu saya juga merekam sebagian besar dialog yang terjadi selama prosesi interogasi yang dilakukan Kepala DSI Langsa terhadap orang-orang yang terjaring razia. Prosesi interogasi tersebut didengarkan secara berulang-ulang, ditranskrip, dan dibaca berulang-ulang untuk memperdetail pemahaman atas peristiwa yang terjadi.

Selanjutnya saya mengklasifikasi temuan observasi maupun wawancara sesuai dengan tema-tema tertentu.¹⁵ Data selanjutnya disajikan secara deskriptif maupun diskursif.¹⁶ Analisis deskriptif digunakan untuk mentranskripsi peristiwa razia ke dalam paparan yang naratif. Analisis diskursif dilakukan dengan cara mendialogkan temuan lapangan dengan literatur lain yang relevan sehingga menghasilkan interpretasi peneliti atas data yang didapatkan dari lapangan.¹⁷

¹⁵ David Silverman, *Interpreting Qualitative Data: Method for Analyzing Talk, Text and Interaction* (London: Sage, 2006); H. Bernard Russell dan Gery W. Ryan, *Analyzing Qualitative Data: Systematic Approaches* (London: Sage, 2009); Christine Bold, *Using Narrative in Research* (London: Sage, 2010); Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln, *The Sage Handbook of Qualitative Research* (London: Sage, 2005).

¹⁶ Irwan Abdullah, “Menulis Itu Gampang: Kiat Menulis Karya Ilmiah Berstandar Nasional”. (Makalah pada Training Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Berstandar Nasional/Internasional, Pascasarjana UIN Malang, 10 Juni 2013)., n.d.

¹⁷ Mengenai diskursus analisis yang digunakan, saya merujuk pada konseptualisasi yang dikemukakan Marcus Moberg. Menurutnya, sedikitnya terdapat tiga level diskursus analisis, yakni secara berurutan (1) refleksi meta-teori

C. Ekologi Langsa dan Masyarakatnya

Lebih kurang tiga jam setelah seseorang menempuh perjalanan darat dari Medan menuju Banda Aceh melalui jalur bagian timur Aceh, maka akan menjumpai pintu gerbang bertuliskan ucapan “Anda Memasuki Wilayah Propinsi Aceh”. Pintu gerbang di perbatasan Kabupaten Aceh Tamiang dan Kabupaten Langkat ini merupakan penanda batas administratif propinsi Aceh dan Sumatera Utara. Langsa bersebelahan dengan Aceh Tamiang. Dari perbatasan Aceh Tamiang, diperlukan tambahan waktu sekitar setengah jam untuk tiba di Langsa. Sementara dari lokasi yang sama seseorang masih memerlukan waktu tempuh sekitar delapan jam untuk sampai di Banda Aceh.

Langsa awalnya merupakan bagian dan sekaligus pusat pemerintahan Kabupaten Aceh Timur. Pasca reformasi, bersama dengan Aceh Tamiang, Langsa mengusulkan untuk memekarkan diri dari Kabupaten Aceh Timur. Usulan ini mendapat respon positif pemerintah pusat sekitar tahun 2001. Bedanya, jika status administratif Aceh Tamiang adalah kabupaten, maka status administratif Langsa merupakan daerah kota. Tapi, pengalaman Langsa hampir setengah abad menjadi pusat pemerintahan Kabupaten Aceh Timur, menjadikan fasilitas infrastruktur yang dimiliki Langsa lebih lengkap dibandingkan kabupaten induknya. Karenanya, tidak

(meta-theoretical reflection); (2) diskursus dan teori keilmuan pada satu bidang tertentu dalam studi agama (discourse and scholarly theorizing within particular su-field in the study of religion); dan (3) diskursus analisis aktual (actual discourse analysis) Marcus Moberg, “First-, second-, and third-level discourse analytic approaches in the study of religion: Moving from mete-theoretical reflection to implementation in practice,” *Religion* 43, no. 1 (2013): 4–25.

mengejutkan apabila hingga saat ini Langsa memiliki posisi strategis di bagian Timur Aceh.

Memiliki populasi sekitar 150 ribu jiwa, Langsa terdiri dari lima kecamatan, yakni Kecamatan Langsa Lama, Langsa Baro, Langsa Barat, Langsa Timur, dan Langsa Kota. Beberapa kawasan tersebut memiliki karakteristik yang berbeda satu sama lain. Karakter geografis kota Langsa dapat dibagi menjadi tiga: yakni daerah perkebunan, daerah perkotaan, dan daerah pesisir.¹⁸ *Pertama*, wilayah perkebunan. Istilah daerah perkebunan digunakan karena kawasan ini secara geografis berada di areal perkebunan sawit milik PTPN 1 Wilayah Langsa. Tidak semua desa di wilayah perkebunan dihuni orang yang bekerja perkebunan, melainkan juga warga perkampungan yang lebih dahulu muncul sebelum perkebunan di kawasan tersebut dibuka pada masa Hindia Belanda.¹⁹ Masyarakat di daerah perkebunan mayoritas beretnis Jawa, meski populasi etnis Aceh atau etnis lainnya juga banyak. Beberapa gampong bahkan lebih dari 90 persen kepala keluarganya beretnis Jawa, misalnya Gampong Bukit Rata, dan Gampong Pondok Kemuning.

Kedua, daerah Pesisir Langsa. Pesisir artinya kawasan yang berdekatan dengan bagian laut. Daerahnya meliputi Langsa Barat (sebagian besar), Langsa Timur (sebagian), dan Langsa Baro (sebagian). Ada beberapa gampong (desa) yang penting disebutkan sebagai representasi daerah pesisir Langsa misalnya, Telaga Tujuh, Sungai Pauh, Matang Seulimeng, Lhok Bani, Simpang Lhee dan

¹⁸ Muhammad Ansor, "'Kita Kan Beda!': Persamaan Remaja Perempuan Muslim dan Kristen di Langsa," *Harmoni* 13, no. 2 (2014): 40.

¹⁹ Untuk bacaan lebih rinci mengenai awal pembukaan perusahaan Belanda di wilayah ini lihat Mohammad Said, *Aceh Sepanjang Abad Jilid II* (Medan: Harian Waspada, 1985), 231–45.

sejenisnya. Populasi orang Aceh di daerah ini, sebagian merupakan kalangan pribumi yang sejak sebelum kehadiran kolonialisme Belanda sudah secara turun-temurun tinggal di Langsa, tetapi sebagian lainnya merupakan hasil migrasi dari Aceh Timur, Perlak, Pidie, Bireun, Aceh Utara, maupun tempat lainnya di Aceh. Konstruksi identitas ke-Acehan orang Langsa secara signifikan dibentuk melalui ekspresi sosial kebudayaan orang Langsa di bagian pesisir ini, dan tentu saja sebagian warga di daerah perkotaan Langsa.

Ketiga, wilayah Kota. Lokasi daerah ini berada di Kecamatan Langsa Kota, pusat pemerintahan Langsa.²⁰ Berbeda dengan daerah pesisir Langsa dan kawasan perkebunan yang memiliki tingkat homogenitas etnis lebih tinggi, daerah kota merupakan daerah percampuran etnisitasitas. Semua etnis yang ada di Langsa seperti etnis Aceh, Jawa, Batak, Minangkabau, dan Cina ditemukan di daerah kota, meski etnis mayoritas tetaplah Aceh. Etnis Cina yang menempati daerah Pecinan yang terletak di pusat kota. Adapun komunikasi sehari-hari warga di daerah perkotaan menggunakan bahasa Aceh dan bahasa Indonesai.

Adapun di daerah pesisir Langsa, hanya sedikit pesta pernikahan yang menampilkan musik atau organ tunggal. Bahkan tarian persembahan yang biasanya dipakai dalam adat Aceh dalam acara penyambutan mempelai laki-laki juga sudah mulai ditinggalkan. Alasannya karena ada tarian anak-anak yang itu tidak sesuai dengan budaya Islam. Pada akhir 2012, saya menghadiri pesta pernikahan sebuah keluarga di Kuala Langsa (daerah pesisir). Tidak

²⁰ "Jalan protokol, Kantor Walikota, Bappeda, Lapangan Merdeka, Polres Langsa, RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah), Kantor DPRK (Dewan Perwakilan Rakyat Kota), berada di daerah ini," n.d.

acara musik maupun organ tunggal. Meski demikian, di daerah pesisir Langsa terkadang ada juga keluarga yang menyelenggarakan pesta perkawinan dengan menampilkan musik Islami, penyanyinya berjilbab dan kecenderungannya memakai rok. Seperti halnya di daerah kota, acara musik dihentikan sebelum pukul lima sore.

Selanjutnya saya akan memaparkan dinamika masyarakat Langsa dengan mendeskripsikan peranan sosial ulama. Tidak diragukan bahwa ulama memiliki peranan sangat menentukan dalam pembentukan identitas Islam Aceh.²¹ Aktivisme anggota Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA) yang dipimpin Daud Beureueh pada masa awal kemerdekaan menjadi bukti signifikansi peranan sosial politik ulama di Aceh.²² Pada masa konflik GAM dengan pemerintah Indonesia, ulama juga memiliki tempat yang istimewa di masyarakat Aceh.²³ Demikian pula pada masa reformasi, penerapan syariat Islam di Aceh tidak dapat dilepaskan dari peranan para ulama.²⁴ Garis besar

²¹ Arskal Salim, *Challenging the Secular State: The Islamization of Law in Modern Indonesia* (Honolulu: University of Hawaii Press, 2009), 151–53 Untuk kajian lebih rinci tentang peranan ulama di Aceh lihat, Ibrahim Alfian, *Sastra Perang: Sebuah Pembicaraan Mengenai Hikayat Perang Sabil* (Jakarta: Balai Pustaka, 1992); Siok Cheng Yeoh, "Umara-Ulama Relations and Pesantrens in Aceh Province, Indonesia: A Study of the Challenges to the Authority of Traditionalist Kyai," (Dissertation Thesis University of Washington).

²² Anthony Reid, *The Blood of the People: Revolution and the end of Traditional Rule in Northern Sumatra* (Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1979), 45–47; James T. Siegel, *The Rope of God* (Berkeley dan Los Angeles: University of California Press, 1969).

²³ Shane Joshua Barter, "Ulama, the State, and War: Community Islamic Leaders in the Aceh Conflict," *Contemporary Islam* 5, no. 1 (2011): 19–36.

²⁴ Arskal Salim, *Challenging the Secular State*, n.d., 154–62.

rumusan Islam yang dipositivisasikan melalui qanun-qanun tentang syariat Islam didominasi versi penafsiran Islam sebagaimana dibayangkan para ulama di Aceh. Lain kata, syariat Islam Aceh pada dasarnya merupakan Islam menurut versi yang dipahami dan dibayangkan para ulama di negeri Serambi Mekkah.²⁵

Akan tetapi Langsa bukanlah daerah dengan sumber daya ulama paling berpengaruh dalam mewarnai system syariat Islam. Letak geografis yang relatif berjauhan dengan episentrum kekuasaan di Aceh membuat Langsa selalu berada di lapisan kelas dua dalam reproduksi diskursus Islam Aceh. Secara historis, saya tidak menemukan figur ulama Langsa yang dapat dikategorikan sebagai ulama paling berpengaruh di Aceh. Alih-alih menjadi pusat pembentukan otoritas keberagamaan, Langsa justru dikenal sebagai basis aktivitas Partai Komunis Indonesia (PKI) di Aceh, sebelum partai ini dinyatakan terlarang.²⁶ Bukannya menjadi pusat gerakan DI/TII, Langsa justru menjadi markas bagi pasukan TNI yang menumpas gerakan tersebut.²⁷

Pada masa Orde Baru dan era reformasi, Langsa tidak termasuk salah satu basis konflik politik berbasis agama ataupun politik yang berlangsung antara Indonesia dengan

²⁵ Mengenai peranan ulama dalam proses legislasi syariat Islam secara lebih rinci lihat Barter, "Ulama, the State, and War: Community Islamic Leaders in the Aceh Conflict," 94-118.

²⁶ Pak Nurdin, Saya mendapatkan informasi tentang aktivisme PKI di Langsa dari tokoh agama maupun warga setempat. Menurut Pak Imam Nurdin, tokoh agama di desa Sidorejo, Langsa, di lokasi yang saat ini menjadi lokasi kampus IAIN Langsa pada 1965 merupakan tempat eksekusi orang-orang yang diduga anggota PKI., Agustus 2012.

²⁷ Mengenai gerakan DI/TII secara lebih rinci lihat Nazaruddin Sjamsuddin, *The Republican Revolt: A Study of the Acehese Rebellion* (Singapore: ISEAS, 1985).

Aceh, sehingga memungkinkan gagasan dan aspirasi politik masyarakatnya perlu menjadi pertimbangan utama bagi pemerintah Indonesia. Selama masa konflik antara GAM (Gerakan Aceh Merdeka) dengan pemerintahan Indonesia misalnya, Langsa menjadi kawasan transit bagi para pejuang kemerdekaan Aceh, sementara pusatperlawanan berada di sekitar 60 kilometer dari kota Langsa.

Berbeda dengan sebagian besar daerah di Aceh, dimana para ulama memainkan peranan penting melampaui aspek sosial keagamaan masyarakatnya; ulama di Langsa belum sepenuhnya memiliki peranan efektif termasuk dalam pembentukan perilaku keagamaan warganya sekalipun. Karenanya, keberadaan lembaga MPU dan Dinas Syariat Islam menjadi panggung paling efektif bagi kelas ulama untuk mengartikulasikan otoritas keagamaan. Ringkas kata, ketika otoritas tradisional tidak cukup efektif untuk membentuk moralitas publik berbasis syariat Islam, pendekatan politik-kekuasaan menjadi alternatif. Penerbitan qanun-qanun syariat Islam, pembentukan DSI, Mahkamah Syariah, WH dan sejenisnya kiranya dapat dijelaskan sebagai manifestasi dari kerangka berpikir demikian.

D. Gosip sebagai Resistensi Simbolik

Mengingat posisinya yang berhadapan langsung dengan masyarakat dalam penegakan syariat Islam, WH tidak hanya sering mendapatkan kritikedari publik, tetapi terkadang juga sasaran kekerasan dari sejumlah warga.²⁸ Kritik disampaikan baik melalui riset, konferensi, seminar, media massa, sosial media, hingga bahkan penyerangan

²⁸ Mumtazul Fikri, "Islam Persuasif dan Multikulturalisme di Aceh: Upaya Rekonstruksi Penerapan Syariat Islam Berbasis Pendidikan," *Akademika* 20, no. 1 (2015): 28.

secara fisik.²⁹ Menurut Aceh Institute, WH merupakan salah satu institusi pemerintah di Aceh yang paling sering mereproduksi kekerasan, baik secara psikologis maupun verbal.³⁰ Pemberitaan media menyebutkan perlawanan sejumlah anggota masyarakat di Aceh terhadap WH pada saat melakukan razia.³¹ Tapi bukan tempatnya di sini untuk membahas semua bentuk kritikan dan perlawanan publik terhadap WH tersebut. Dalam pembahasan bagian ini, saya hanya membatasi pada penggunaan gosip sebagai

²⁹ Untuk tulisan mengenai penggunaan media massa untuk mengungkapkan kritik [dan dukungan] terhadap WH maupun pelaksanaan syariat Islam Aceh, lihat R. Michael Feener, "Hand, Heart, and Handphone: State Sharia in the Age of SMS," *Contemporary Islam* 7, no. 1 (2013): 15-32.

³⁰ Dina Afriyanti, *Women and Shari'a Law in Northern Indonesia: Local Women's NGOs and the Reform of Islamic Law in Aceh* (London and New York: Routledge, 2015), 68-70.

³¹ Berikut beberapa liputan penyerangan terhadap WH di Langsa. "Markas WH Diserang Sekelompok ABG Mabuk," Desember 2012, <http://m.detik.com/news/berita/2432187/markas-wh-langsa-diserang-sekelompok-abg-mabuk>; "Tim WH Langsa Kembali Diserang Kelompok Pemuda," 24 Februari 2014, <http://aceh.tribunnews.com/2014/02/24/tim-wh-langsa-kembali-diserang-kelompok-pemuda>; "Patroli Rutin, Mobil WH Langsa Dilempari Batu," Oktober 2014, <http://www.ajnn.net/news/patroli-rutin-mobil-wh-langsa-dilempari-batu>; "Gerebek Warung, WH Diserang 'Preman' Peukan Eungkot," 15 Juli 2015, <http://www.prohaba.co/2015/07/16/gerebek-warung-wh-diserang-preman-peukan-eungkot#.WI2302albMI>; "WH Kembali Diserang Warga Saat Bubarkan Keyboard," Agustus 2015, <http://medanbisnisdaily.com/m/news/read/2015/08/19/181359/wh-kembali-diserang-warga-saat-bubarkan-keyboard/>.

ungkapkan resistensi simbolik terhadap DSI dan WH Langsa.³²

James C. Scott mengatakan gosip merupakan kisah yang diceritakan tentang pihak ketiga yang tidak hadir. Sekalipun gosip itu bukan cerita yang menghormati orang, gosip jahat sekalipun (tetap) menghormati tatanan normatif yang lebih luas tempat ia beroperasi.³³ Di balik setiap potong gosip yang tidak hanya sekedar berita, terdapat pernyataan tersirat tentang suatu peraturan atau norma yang telah dilanggar. Sesungguhnya, hanya pelanggaran tingkah laku yang menjadikan suatu peristiwa bernilai dan menarik digosipkan.³⁴ Bagi kelompok yang didominasi, gosip merupakan salah satu cara untuk mengungkapkan resistensi secara tersembunyi (*hidden transcripts*), apabila resistensi secara terbuka tidak mungkin dilakukan.³⁵ Niko Besnier mengatakan gosip sebagai instrumen produksi politik dalam kehidupan keseharian masyarakat terdominasi.³⁶

Beberapa contoh perlu dikemukakan mengenai gosip sebagai ungkapan resistensi simbolik. Sebagaimana

³² Uraian versi lebih ringkas mengenai gosip sebagai resistensi perempuan di Langsa terhadap implementasi syariat Islam telah diuraikan pada tulisan saya yang lain. Lihat Muhammad Ansor, "Being Women in the Land of Sharia: Politics of the Female Body, Piety and Resistance in Langsa, Aceh," *Aljamiah: Journal of Islamic Studies* 52, no. 1 (2014): 72-75.

³³ James C. Scott, *Domination and the Arts of Resistance: Hidden Transcripts* (London: Yale University Press New Haven and London, 1990), 142.

³⁴ James C. Scott, *Weapons of the Weak: Everyday Forms of Resistance* (London: Yale University, 1985), 182.

³⁵ Lihat James C. Scott, *Domination and the Arts of Resistance*, n.d., 17-44.

³⁶ Niko Besnier, *Gossip and the Everyday Production of Politics* (Honolulu: University of Hawai'i Press, 2009).

dipaparkan sebelumnya, pada 1 September 2012 saya bertemu Pak Yanto, di kantor DSI Langsa. Dia datang kantor DSI karena menjemput anggota keluarganya yang terjaring razia. Ketika saya menanyakan pendapatnya tentang razia yang dilakukan DSI dan WH, dengan sinis Pak Yanto mengatakan bahwa sekarang ini saatnya pembentukan struktur kepala dinas di Langsa setelah seminggu sebelumnya walikota yang terpilih dilantik Gubernur Aceh. “Pak Latif sedang “cari muka” di depan Walikota” katanya. Komentar Pak Yanto tersebut menggambarkan bagaimana bibit gosip direproduksi. Pak Kepala DSI dipastikan tidak akan membenarkan penilaian Pak Yanto. Tapi, terlepas benar atau tidaknya motif yang dituduhkan tersebut, penilaian serupa mengalir dengan cepat dari mulut ke mulut warga.

Gosip sebagai perlawanan simbolik juga muncul di seputar pemerkosaan seorang gadis oleh tiga oknum WH pada 10 Januari 2010. Ketika pada Oktober 2010 saya mewawancarai warga di 30 desa di Langsa, tidak ada pertanyaan yang saya kemukakan terkait dengan implementasi syariat Islam kecuali para responden mengaitkan dengan peristiwa pemerkosaan oleh oknum WH pada 10 Januari 2010.³⁷ Pertanyaan saya menjadi mesin pemicu bagi mereka mengungkapkan banyak hal yang sebenarnya sudah sering mereka daur ulang dalam setiap perbincangan di warung kopi atau tempat pergunjungan para perempuan. Aspek personal anggota WH dan DSI menjadi santapan gosip warga, dikuliti sampai detailnya, tidak hanya pribadi-pribadi atau keluarga oknum WH yang terlibat dalam pemerkosaan, tapi juga personil lainnya. Aida, seorang mahasiswi yang pernah terjaring

³⁷ Muhammad Ansor, “Religiusitas, Islamisme dan Sikap atas Penerapan Syariat Islam di Langsa, Aceh,” *Jurnal Hukum Islam* 11, no. 2 (2011): 131–47.

razia menilai “orang-orang WH melarang orang ke PTPN 1, sedangkan mereka sendiri *bawa* cewek ke sana. Waktu pemerkosaan oleh oknum WH itu bahkan dilakukan di kantor sendiri. Alasan mau razia, tapi malah memerkosa orang.”³⁸

Di desa Seulalah Baru, kecamatan Langsa Lama, gosip tentang pemerkosaan beredar cepat di masyarakat. Wanda, nama samaran salah satu oknum WH yang dimaksud, digosipkan sebelumnya sudah pernah tertangkap warga sedang mesum bersama seorang perempuan, tetapi kemudian diselesaikan secara adat. Dia dinikahkan dengan perempuan bersangkutan. Masyarakat menggosipkan ketidak-tegasan pimpinan di WH karena tetap memperkerjakan Wanda meskipun sudah mencemarkan nama baik institusi.³⁹ Seorang perempuan anggota WH mengatakan bahwa salah satu tugas rutin anggota WH adalah melakukan patroli pada hari Jumat, untuk memastikan Muslim di Langsa melakukan shalat Jumat. Tapi, sejak kasus pemerkosaan oleh tiga oknum anggota WH, razia shalat Jumat sudah tidak lagi dilakukan secara rutin. Pernah suatu kali, rombongan perempuan yang berpatroli justru dihadang sejumlah perempuan, sehingga nyaris terjadi bentrokan.⁴⁰

Kasus pemerkosaan oleh oknum WH merangsang masyarakat membincang semua aspek tentang WH. Proses rekrutmen memang menjadi salah satu sub tema yang dipergosipkan. Reta Qadrina (24), seorang anggota WH, menceritakan kepada saya bagaimana masyarakat menggosipkan proses yang dapat menjelaskan alasan Leni (23 tahun) seorang penyanyi dalam group musik orgen

³⁸ Wawancara Aida, Agustus 2012.

³⁹ Wawancara Marhami, Agustus 2012.

⁴⁰ Wawancara Reta Qadrina, Agustus 2012.

tunggal dapat diterima sebagai anggota WH.⁴¹ Beberapa diantara mereka berharap Leni merubah penampilan dan sikapnya setelah menjadi anggota WH. Tetapi tidak ada perubahan yang ditemukan pada dirinya meskipun sudah lebih dari empat tahun menjadi personil WH. Kisah tentang Leni menjadi sumber inspirasi bagi warga untuk mereproduksi gasip-gosip susulan di sekitar WH. Menurut Marhami, rekrutmen anggota WH yang dinilai berada di luar normalitas dan kepatutan ini selalu bermuara pada siapa di belakang orang bersangkutan dan berapa uang yang dikeluarkan untuk diterima menjadi anggota WH.⁴² Lain itu, gosip juga ditujukan untuk menyerang kualitas moral pimpinan WH dan DSI.

Mayoritas gosip atau pun rumor tersebut memang tidak dapat diklarifikasi kebenarannya. Tapi, sesungguhnya yang dipentingkan oleh gosip bukanlah nilai dan validitas dari sebuah kisah, melainkan bagaimana hal tersebut menjadi cara pengungkapan perlawanan tanpa harus meninggalkan jejak. Gosip memang diniatkan untuk tujuan mengekspresikan perlawanan terhadap otoritas penegak syariat Islam. Menurut James C. Scott kemunculan “gosip tak pernah tanpa pamrih”. Suatu nama baik bisa difitnah dengan gosip, suatu peraturan yang begitu diterima secara umum, segera dipastikan dan dipromosikan. Sebaliknya, sebuah peraturan yang kurang dapat diterima menjadi santapan gosip tanpa mengenal ampun.⁴³ Gosip, menurut Scott merupakan upaya gerilya untuk memajukan tuntutan dan kepentingannya dan kepentingan orang-orang lain juga. Akan tetapi, manipulasi peraturan ini hanya akan berhasil apabila diadakan himbauan akan standar-standar perilaku yang

⁴¹ Ibid.

⁴² Wawancara Marhami, Agustus 2012.

⁴³ James C. Scott, *Weapons of the Weak*, n.d., 182.

biasanya diterima. Maka gosip dengan demikian merampungkan tugas sebagai sanksi sosial yang diakui sebagai lemah, namun sedikit banyak tetap tinggal (di dalam batas-batas) kerangka normatif yang telah ada. Dalam segi ini gosip oleh kalangan kelas sub-ordinat juga memanifestasikan kebijaksanaan dan rasa hormat, sekalipun manipulatif dalam dirinya sendiri.⁴⁴

Bagi orang Langsa, konstalasi informasi yang beredar dalam rubrik gosip menempati posisi diperhitungkan, lantaran yang menjadi tujuan serangan dari gosip adalah delegitimasi status sosial pihak yang diserang. Adalah kesepakatan bahwa siapapun yang digosipkan, saat bersamaan dia sedang berada di titik terjauh dari garis normalitas atau paling tidak sedang berada di ambang normalitas yang dibayangkan publik. Bagi orang di Langsa, untuk tetap berada dalam di garis normalitas menempati posisi penting. Hal ini tidak lepas dari kerasteristik struktur sosial budaya di Aceh yang menempatkan normalitas dalam praktik beragama menjadi bagian sangat penting. Ketika sebuah nama tertentu dimasukkan dalam daftar rubrik gosip warga, pada saat bersamaan yang bersangkutan dianggap berada di luar zona normalitas. Kelas sub-ordinat menyadari bahwa gosip memiliki kekuatan yang bahkan dapat menghilangkan status kelas superior sekalipun.

Rumor juga menempati posisi sama signifikannya sebagai medium mengungkapkan perlawanan. Bedanya, apabila gosip memiliki subyek yang jelas mengenai aktor yang sedang menjadi sasaran, rumor tidak selalu memberikan informasi cukup jelas. Terkadang warga Langsa menyodorkan informasi tentang maraknya para pejabat di Langsa yang memesan wanita pekerja seks

⁴⁴ James C. Scott, *Weapons of the Weak*, n.d., 182; Scott, *Domination and the Arts of Resistance: Hidden Transcripts*, 142-43.

komersil di Medan atau di luar Langsa.⁴⁵ Namun, berbeda dengan gosip yang terkadang subyek yang diperbincangkan secara lebih mendetail, rumor tidak selalu siap dengan informasi semacam ini. Tapi, hal yang demikian ini dapat dimengerti mengingat sasaran rumor merupakan serangan simbolis terhadap elite dominan, karenanya, aktor yang dimaksudkan tidak penting untuk disebutkan. Bagi sebuah rumor, yang penting adalah deligitimasi institusi, bukan hanya nama tertentu dari pejabat yang sedang dipergunjingkan. Meminjam analisis Reed Taylor, gossip memperlihatkan bahwa warga memiliki ruang imajinasi yang terkadang bertolak belakang dengan pejabat dan elite agama terkait syariat Islam.⁴⁶

Gossip dan rumor bukan hanya senjata yang khas orang-orang yang kalah. Kelas yang mendominasi juga cukup canggih mereproduksi gossip dan rumor untuk mengukuhkan diri atau menjatuhkan lawan. Kasus seorang gadis bunuh diri pada minggu pertama September 2012, terjadi karena setelah ditangkap WH dan DSI Langsa, yag bersangkutan distigmakan sebagai perempuan pelacur. Karena sumber daya yang dimiliki, elite lebih mampu menggunakan instrumen yang canggih (seperti media massa) dalam reproduksi gossip dan rumor. Implikasinya, Putri Erlina bunuh diri, bukannya semata karena razia, tetapi juga dipicu stigma media bahwa dirinya bukan perempuan baik-baik. Sikap Putri Erlina hemat saya merupakan puncak resistensi simbolik perempuan tidak memiliki ruang untuk melawan stigma negatif yang dilekatkan kepadanya melalui razia syariat.

⁴⁵ Wawancara Muhammad Nusi, 1 September 2012.

⁴⁶ Reed Taylor, "Syariah as Heterotopia: Responses from Muslim Women in Aceh, Indonesia," *Religions* 6, no. 2 (2015): 566–93.

E. Simpulan

Seluruh uraian di atas menjelaskan bahwa razia yang dilakukan DSI dan WH Langsa bertujuan memastikan syariat Islam dipraktikkan warganya secara *kaffah*. Tetapi DSI dan WH menghadapi sejumlah hambatan dalam mewujudkan tugas tersebut. Tulisan memperlihatkan aksi razia syariat mengundang sentimen negatif dari masyarakat. Sentimen negatif tersebut muncul dalam bentuk resistensi kendati terkadang diungkapkan secara anonim. Gosip merupakan salah satu bentuk perlawanan sehari-hari yang ungkap warga secara anonim agar tidak teridentifikasi pihak yang memiliki otoritas agama.

Gosip biasanya mengambil banyak bentuk, tetapi tujuannya sama yakni melampiaskan ketidak-puasan atas dominasi yang dilakukan aparat syariat, dengan cara mengungkapkannya kepada pihak lain. Detail kehidupan WH, personil Dinas Syariat Islam, pejabat publik maupun ulama menjadi santapan gosip. Para pejabat di Langsa, kendati namanya tidak pernah disebutkan secara jelas, selalu dirumorkan melakukan pelanggaran batas-batas moralitas ketika berada di luar Langsa. Gosip dan rumor merupakan perlawanan yang tidak pernah berharap menang. Kritikan terhadap razia syariat yang diungkapkan melalui gossip, pada dasarnya tidak bertujuan mengubah kebijakan syariat Islam, apalagi membatalkan pemberlakuan syariat Islam di Aceh.

Tulisan di atas memperlihatkan problematika legislasi hukum Islam karena agama pada dasarnya ditafsirkan secara berbeda-beda oleh umatnya. Memaksakan salah satu jenis tafsir tertentu melalui politik-legislasi merupakan salah satu bentuk perayaan kuasa yang pada gilirannya mereproduksi intoleransi oleh negara. Riset ini memperlihatkan bahwa pendisiplinan moralitas publik dengan cara yang intoleran dan dominatif tidak

hanya memantik citra negatif terhadap syariat Islam, tapi juga resistensi dari masyarakat[.]

REFERENSI

- Abdullah, Irwan. “Menulis Itu Gampang: Kiat Menulis Karya Ilmiah Berstandar Nasional’. (Makalah pada Training Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Berstandar Nasional/Internasional, Pascasarjana UIN Malang, 10 Juni 2013).,” n.d.
- Afriyanty, Dina. *Women and Shari’a Law in Northern Indonesia: Local Women’s NGOs and the Reform of Islamic Law in Aceh*. London and New York: Routledge, 2015.
- Aida, Agustus 2012.
- Ansor, Muhammad. “Being Women in the Land of Sharia: Politics of the Female Body, Piety and Resistance in Langsa, Aceh.” *Aljamiah: Journal of Islamic Studies* 52, no. 1 (2014).
- — —. “‘Kita Kan Beda!’: Persamaan Remaja Perempuan Muslim dan Kristen di Langsa.” *Harmoni* 13, no. 2 (2014).
- — —. “Religiusitas, Islamisme dan Sikap atas Penerapan Syariat Islam di Langsa, Aceh.” *Jurnal Hukum Islam* 11, no. 2 (2011).
- Barter, Shane Joshua. “Ulama, the State, and War: Community Islamic Leaders in the Aceh Conflict.” *Contemporary Islam* 5, no. 1 (2011).
- Bernard, H. Russell. *Research Methods in Anthropology: Qualitative and Quantitative Approaches*. New York: Altamira Press, 2006.
- Besnier, Niko. *Gossip and the Everyday Production of Politics*. Honolulu: University of Hawai’i Press, 2009.
- Bold, Christine. *Using Narrative in Research*. London: Sage, 2010.

- Denzim, Norman K., dan Yvonna S. Lincoln. *The Sage Handbook of Qualitative Reserach*. London: Sage, 2005.
- Febriandi, Yogi, Muhammad Ansor, dan Syamsul Rizal. "Razia Busana Muslim, Syariat Panopticon, dan Remaja Perempuan Langsa, Aceh." In *Islam dan Negosiasi Relasi Gender*. Langsa: Zawiyah, 2015.
- Feener, R. Michael. "Hand, Heart, and Handphone: State Sharia in the Age of SMS." *Contemporary Islam* 7, no. 1 (2013).
- — —. *Shari'a and Social Engineering*, n.d.
- — —. *Shari'a and Social Engineering: The Implementation of Islamic Law in Contemporary Aceh, Indonesia*. Oxford: Oxford University Press, 2013.
- — —. "Social Engineering through Shari'a: Islamic Law and State-Directed Da'wa in Contemporary Aceh." *Islamic Law and Society* 19, no. 3 (2012).
- Fikri, Mumtazul. "Islam Persuasif dan Multikulturalisme di Aceh: Upaya Rekonstruksi Penerapan Syariat Islam Berbasis Pendidikan." *Akademika* 20, no. 1 (2015).
- "Gerebek Warung, WH Diserang 'Preman' Peukan Eungkot," 15 Juli 2015. <http://www.prohaba.co/2015/07/16/gerebek-warung-wh-diserang-preman-peukan-eungkot#.WI2302albMI>.
- Gupta, Akhil. "Authorship, Research Assistants and the Ethnographic Field." *Ethnography* 15, no. 2 (2014).
- Jamaluddin, Jajang, dan Imran. "Surat Terakhir Putri." *Majalah Tempo*, 23 September 2012.
- — —. *Surat Terakhir Putri*, 2012.
- Kloos, David. "In the Name of Syariah? Vigilante Violence, Territoriality, and Moral Authority in Aceh, Indonesia." *Indonesia* 98 (Oktober 2014).
- Marhami, Agustus 2012.
- — —, Agustus 2012.

- "Markas WH Diserang Sekelompok ABG Mabuk," Desember 2012. <http://m.detik.com/news/berita/2432187/markas-wh-langsa-diserang-sekelompok-abg-mabuk>.
- Moberg, Marcus. "First-, second-, and third-level discourse analytic approaches in the study of religion: Moving from mete-theoretical reflection to implementation in practice." *Religion* 43, no. 1 (2013).
- Muhammad Nusi, 1 September 2012.
- Otto, Benjamin, Jan Michiel Otto, R. Michael Feener, David Kloos, dan Annemarie Samuels. "Shari'a Police in Banda Aceh: Enforcement of Islam-based Regulations and People's Perceptions." In *Islam and the Limits of the State: Reconfigurations of Practice, Community and Authority in Contemporary Aceh*. Leiden: Brill, 2016.
- "Patroli Rutin, Mobil WH Langsa Dilempari Batu," Oktober 2014. <http://www.ajnn.net/news/patroli-rutin-mobil-wh-langsa-dilempari-batu>.
- Reid, Anthony. *The Blood of the People: Revolution and the end of Traditional Rule in Nothern Sumatra*. Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1979.
- Reta Qadrina, Agustus 2012.
- Russell, H. Bernard, dan Gery W. Ryan. *Analyzing Qualitative Data: Systematic Approaches*. London: Sage, 2009.
- Said, Mohammad. *Aceh Sepanjang Abad Jilid II*. Medan: Harian Waspada, 1985.
- Salim, Arskal. *Challenging the Secular State*, n.d.
- — —. *Challenging the Secular State: The Islamization of Law in Modern Indonesia*. Honohulu: University of Hawaii Press, 2009.
- Scott, James C. *Domination and the Arts of Resistance*, n.d.
- — —. *Domination and the Arts of Resistance: Hidden Transcripts*. London: Yale University Press New Haven and London, 1990.

- — —. *Weapons of the Weak*, n.d.
- — —. *Weapons of the Weak*, n.d.
- — —. *Weapons of the Weak: Everyday Forms of Resistance*. London: Yale University, 1985.
- Siegel, James T. *The Rope of God*. Berkeley dan Los Angeles: University of California Press, 1969.
- Silverman, David. *Interpreting Qualitative Data: Method for Analyzing Talk, Text and Interaction*. London: Sage, 2006.
- Sjamsuddin, Nazaruddin. *The Republican Revolt: A Study of the Acehese Rebellion*. Singapore: ISEAS, 1985.
- Spradley, James P. *The Ethnographic Interview*. New York: Holt, Rinehart and Winston, 1979.
- Syihab, Mahdi, Arskal Salim, dan Adlin Sila. "Menegakkan Syariat Islam: Etnografi Aksi Razia Santri Dayah di Aceh Utara." In *Serambi Aceh yang Berubah: Views from Within*. Jakarta: Alvabet, 2010.
- Taylor, Reed. "Syariah as Heterotopia: Responses from Muslim Women in Aceh, Indonesia." *Religions* 6, no. 2 (2015).
- "Tim WH Langsa Kembali Diserang Kelompok Pemuda," 24 Februari 2014. <http://aceh.tribunnews.com/2014/02/24/tim-wh-langsa-kembali-diserang-kelompok-pemuda>.
- "WH Kembali Diserang Warga Saat Bubarkan Keyboard," Agustus 2015. <http://medanbisnisdaily.com/m/news/read/2015/08/19/181359/wh-kembali-diserang-warga-saat-bubarkan-keyboard/>.